PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

(Studi kasus pada Dinas Kabupaten Bandung Barat)

Oleh:

Fitria Asri Kurnia

21112157

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Demi terwujudnya tata keuangan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. (Abdul Halim, 2010:87)

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja intansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Rahardjo Adisasmita, 2011:103)

Dalam rangka petanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bukti konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap laporan keuangan entitas pemerintah digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). (Mahmudi, 2016:97)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja keuangan dari organisasi perangkat daerah dan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. (Mahmudi, 2016:2)

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu melalui sebuah proses yang tidak sederhana. penyediaan input akuntansi yang baik dan benar, proses pencatatan hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah sistem dan prosedur. Sistem dan dan prosedur dimaksud adalah sebuah aspek atau bidang ilmu akuntansi yang disebut Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. informasi yang disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi. Oleh karena itu, organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi. SAP merupakan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan isntansi pemerintah, maka sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai SAP. Dengan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). (Abdul Halim, 2010:32)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dalam rangka pertanggunggjawaban pelaksanaan

APBD. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP). (Abdul Halim, 2010:97)

Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sistem Akuntansi Keuangan Daeah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penataausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara garis besar terdiri dari Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Selain Kas dan Aset Tetap. (V.Wiranata Sujarweni, 2015:158)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Pada dasarnya laporan keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dan bukan untuk mempersulit atau membingungkan pemangku kepentingan. Namun pada kenyataanya, dalam penyajian laporan keuangan tersebut masih saja terdapat permasalahan. Bahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD pun masih saja ada temuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tersusun dengan baik. Dari total 539 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 252 LKPD, opini WDP atas 247 LKPD, opini TMP atas 35 LKPD dan opini TW atas 5 LKPD. Adapun LKPD yang masih memperoleh opini WDP dan TMP pada umumnya disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku (SAP). Ketidaksesuaian dengan SAP tersebut meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggungjawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Dari temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan instansi pemerintah masih belum maksimal. Hal ini tentu menimbulkan dampak negative kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2015 seperti dilansir dalam harian merdeka, 7 juni 2016 terdapat empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang terindikasi bermasalah dalam penyusunan LKPD. Temuan BPK tersebut terungkap dalam LHP BPK RI atas LKPD tahun 2015 yang disampaikan kepada 4 DPRD Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Keempat daerah bermasalah tersebut salah satunya ialah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2011 dan 2012, pemkab juga mendapat hasil serupa. Bahkan pada tahun 2013 sempat memperoleh opini Tidak Memberikan pendapat (TMP). Permasalahan yang mengganjal dalam laporan Pemkab Bandung tersebut diantaranya, terdapat kelemahan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, seperti penggunaan dan pertanggungawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) dan belanja makan/minum masing-masing sebesar Rp 10,34 miliar dan Rp 223, 59 juta yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaanya, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal pada dinas pendidikan dan kebudayaan serta sekertariat daerah masing-masing sebesar Rp 52,66 miliar dan Rp 829 juta, penyajian dan pengeloalaan saldo persedian yang tidak memadai. Selain itu, penyajian asset tetap tidak didukung dengan rincian daftar asset maupun dokumen yang berupa daftar inventarisasi dan penilaian asset tersebut. Jikapun daftar diinventarisasi sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang menyebabkan mutase barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatanya. Seperti penyajian jumlah dan nilai asset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada dinas sumber daya air, pertambangan dan energi sebanyak 937 unit senilai 143, 27 miliar tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Menurut Maman Sunjaya selaku sekertaris daerah Pemerintah Kabupaten Bandung kelemahan Kabupaten Bandung Karena pengelolaan asset yang banyak tidak tercatat. Banyaknya asset daerah milik pemerintah Kabupaten Bandung membuat pengelolaanya sulit dilakukan. (http:/nasional.tempo.com)

Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat masih belum sepenuhnya baik. Karena dalam penyajianya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari keempat kriteria laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami tersebut yang bermasalah ialah dalam hal

andal. Andal (*reability*) meliputi disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan harus terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan. Sedangkan untuk LKPD Kabupaten Bandung Barat Barat masih mengalami kendala, dimana dalam penyajianya masih terdapat salah saji, terlebih dalam hal pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. Temuan ini mengindikasi masih buruknya kinerja aparatur pemerintah kabupaten bandung barat menyangkut akuntabilitas keuangan yang dijalankan selama ini.

Akuntabilitas Kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai belum baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaranya. Selama empat tahun berturut turut pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini WDP. Bahkan pada 2013 sempat memperoleh opini TMP itu sebagai bukti bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas seluruh SKPD masih belum memuaskan dan perlu pembenahan serta perbaikan.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Ni Made Rika Krisna Dewi, dkk (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten J
embrana, hasil penelitiannya menunjukkan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya pada tahun 2014 Nurhayati Soleha melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan, diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu Bambang Pamungkas (2012) melakukan penelitian Pengaruh Penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya baik. Karena dalam penyajianya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari keempat kriteria laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami tersebut yang bermasalah ialah dalam hal andal. Andal (*reability*) meliputi disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan harus terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan. Sedangkan untuk LKPD Kabupaten Bandung Barat Barat dalam laporan keuangnya masih mengalami kendala, dimana dalam penyajianya masih terdapat salah saji, terlebih dalam hal pencatatan aset/barang milik daerah. asset tetap tidak diketahui keberadaanya atau dikuasai pihak lain dan tidak didukung bukti kepemilikan.
2. Akuntabilitas Kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai buruk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaranya. Selama empat tahun berturut turut pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini WDP. Bahkan pada 2013 sempat memperoleh opini TMP itu sebagai bukti bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas seluruh SKPD masih belum memuaskan dan perlu pembenahan serta perbaikan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada dinas Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Untuk itu, yang penulis lakukan adalah memperoleh data empiris dan informasi pendukung mengenai variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian menguji pengaruh diantara variabel tersebut secara rasional dengan alat uji hipotesis.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan diatas, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, khususnya mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Selain merupakan salah satu syarat untuk menempuh Sidang Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, penelitian ini juga merupakan bagian dari suatu proses belajar dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal yang diteliti.

I. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu :

"sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)."

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:11) Laporan Keuangan adalah :
"Informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas."

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Rudi M. Harahap (2013:19) dalam buku Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sertor Publik menerangkan sebagai berikut:
"Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/kegagalan misi organisai/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2004: 96) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Mursyidi (2013:59) Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

H2: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) menjelaskan definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:
"Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan".

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan signifikansi antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Menurut Sugiyono (2014:38) menjelaskan definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut:
"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Sesuai dengan judul yang diteliti oleh peneliti yaitu pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Maka terdapat tiga variabel yang akan diukur, yaitu:

1. Variabel Independen
   Menurut Sugiyono (2013:39) mengemukakan pengertian variabel independen (bebas) adalah sebagai berikut:
   "Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y).
2. Variabel *Intervening*
   Menurut Sugiyono (2013:41) pengertian variabel *intervening* adalah sebagai berikut:
   "Variabel *intervening* (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur".
3. Variabel Dependen
   Menurut Sugiyono (2013:39), definisi dari variabel dependen (terikat) adalah sebagai berikut:
   "Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2014:137) mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:
"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen".

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kabupaten Bandung Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Reseach).* Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)
   a. Wawancara *(Interview)*
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara sebagai berikut:
      "Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas".
      Adapun wawancara dilakukan terhadap pegawai Dinas Kota Bandung mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
   b. Kuesioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:
      "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".
      Sedangkan Kuesioner menurut Suharsimi (2010:194) adalah
      "sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui".

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80), mengemukakan pengertian populasi sebagai berikut:
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 12 Dinas Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari, Pegawai bagian akuntansi sebanyak 72 orang, dan kasubag keuangan sebanyak 12 orang, berjumlah 84 orang. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 84 Pegawai pada Dinas Kabupaten Bandung Barat.

3.4.2 Penarikan Sampel

Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh.
Menurut Sugiyono (2013:85) pengertian dari sampling jenuh adalah sebagai berikut:
"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 84 responden.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan data primer. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penelitian ini dimulai pada bulan September 2016 sampai Maret 2017.

3.5 Metode Pengujian Data

Teknik pengujian data yang digunakan adalah:

1. Uji Validitas
menurut Sugiyono (2013:3) validitas didefinisikan sebagai berikut:
"Validitas adalah menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".
Berdasarkan pengertian di atas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realiabilitas adalah sebagai berikut:
"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

2. Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realiabilitas adalah sebagai berikut:

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

"Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1) Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan keusioner yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

2) Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Analisis Jalur (*Path Analysis*).

Menurut Juliansyah Noor (2014:97) menjelaskan mengenai definisi analisis jalur (*path analysis*) sebagai berikut:

" Analisis jalur (path analysis) adalah keterkaitan hubungan/pengaruh antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat dimana peneliti mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab variabel lainnya yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Didalam diagram ada gambar panah-panah yang menunjukkan arah pengaruh antar variabel bebas, intervening, dan variabel terikat. Dan biasanya digambarkan dengan tanda panah satu arah".

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan terhadap keterkaitan variabel X dengan Y, dan variabel Y dengan variabel Z menggunakan rancangan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Umi Narimawati (2010:48) mengemukakan bahwa analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel interfening dengan mempertimbangkan keterkaitan antarvariabel independen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik pula.
2. Kualitas Laporan Keuangan mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dinas Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baiknya pencatatan dan

pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka hal tersebut akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

a. Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan perlu ditingkatkan penilaian resiko dan informasi serta komunikasi dalam Sistem Pengendalian Intern maksudnya dinas Kota Bandung lebih baik dengan menerapkan pengendalian resiko untuk program kegiatan, yang telah dianggarkan sehingga ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan program kegiatan dinas pada Kota Bandung telah melakukan penaganan dengan pengendalian resiko yang telah dirumuskan pada periode sebelumnya dan Dinas sebaiknya meningkatkan informasi serta komunikasi dalam pelaksanaan laporan keuangan seperti, memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan sebagai bentuk akuntabilitas pada dinas Kota Bandung dengan cara membuat web yang berisi laporan keuangan setiap bulan atau minimal pertiga bulan sekali
b. Solusi yang lain terkait dengan permasalahan inventarisasi dan pengelolaan aset instansi pemerintah, maka perlu memperkuat kembali Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Aset Tetap. Hal ini terutama terkait dengan aset-aset yang dimiliki instansi pemerintah dan masih menjadi wewenang tunggal pengelolaan terhadap aset-aset tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan permasalahan aset instansi pemerintah yang berupa gedung dan tanah, maka perlu dicarikan solusinya dengan mengajak pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian, keinginan untuk meningkatkan opini atau penilaian LK dari WDP menjadi WTP pada instansi pemerintah kabupaten bandung barat dapat terwujud.
c. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah atas program kegiatan yang telah disusun pada periode sebelumnya jadi dinas pada Kabupaten Bandung Barat sebaiknya memiliki rasa tanggungjawab atas apa yang telah menjadi program dalam periode tertentu, pelaksanaan dalam ketepatan waktu juga menjadi saran dari penulis yang diberikan karena awal dari sebuah kegiatan harus dirancang dengan matang sehinga mendapatkan hasil yang juga matang tentu saja didukung oleh proses yang juga matang.
d. Sebaiknya dinas Kota Bandung lebih mempersiapkan program dengan perhitungan yang matang serta menerapkan penilaian resiko dalam penyusunan program kegiatan, serta menyusun laporan sesuai dengan realisasi yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

5.2.2 Saran Aademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bambang Pamungkas. 2012*. Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Volume 12, No. 1.

Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.

Erlina Rasdianto. 2013. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan: Brama Ardian

Erwan dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Hariadi, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Iman Mulyana. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia.* Yogyakarta: Kansius.

Juliansyah Noor. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Kadek Desiana Wati, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2, No. 1.

Luh Kadek Sri Megawati, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume. 3, No. 1.

M. Rudi Harahap. 2013. Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. Jakarta: Buletin Informasi dan Teknologi.

Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Revika Tama.

Ni Made Rika Krisna Dewi, dkk. 2014*. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada 10 Skpd Berupa Dinas Di Kabupaten Jembrana*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2, No.1.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitaif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* 12th Edition. Bandung: Afabeta.

Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk ekonomi dan keuangan modern.* Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Urip Santoso, Yohanes Joni Pambelum. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabiltas Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud*. Vol 4, No. 1; 14-33, ISSN:0216-1249.

V. Wiranata Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.